

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan modal pembangunan serta awal kunci kemajuan di masa depan. Sepertiga dari total penduduk Indonesia adalah anak-anak, maka melindungi anak adalah suatu keniscayaan dan kewajiban seluruh pihak. Untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak, maka dibuatlah peraturan didalam undang undang no 23 tahun 2002 pasal 4 mengenai perlindungan anak.

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Lebih rinci lagi, didalam UU No. 35 tahun 2014 (Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2003) dijelaskan bahwa anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, yakni hak untuk dapat hidup bersama dengan keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimilikinya.

Hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM), akan tetapi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini banyak bermunculan kasus kasus kekerasan kepada anak yang terjadi di Indonesia, hal ini merupakan cerminan bahwa anak belum terpenuhi hak-haknya bahkan cenderung diabaikan dan terjadi pelanggaran. United Nations Children's Fund atau disingkat UNICEF sebagai salah satu lembaga PBB yang menyediakan bantuan berkepanjangan dalam kemanusiaan serta perkembangan anak-anak juga para ibu di negara-negara berkembang telah melakukan survey dan hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki persentase kasus kekerasan pada anak tertinggi. Pada Tahun 2015 saja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat telah terjadi 6006 kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Angka ini meningkat signifikan dari tahun 2010 yang hanya 171 kasus, sementara pada tahun 2011, tercatat sebanyak 2179 kasus, 2012 sebanyak 3512 kasus, 2013 sebanyak 4311 kasus, dan pada tahun

2014 sebanyak 5066 kasus, dan yang terbaru tahun 2016 sudah terjadi lebih dari 1000 kasus kekerasan pada anak. (Setyawan, 2015).

Selain kekerasan pada anak KPAI juga menerima laporan mengenai kekerasan kepada anak yang setiap tahunnya meningkat, pada tahun 2010 mencapai 2.046 kasus, laporan kekerasan pada tahun 2011 naik menjadi 2.462 kasus, pada tahun 2012 naik lagi menjadi 2.629 kasus dan melonjak tinggi pada tahun 2013 tercatat ada 1.032 kasus kekerasan pada anak yang terdiri dari: kekerasan fisik 290 kasus (28%), kekerasan psikis 207 (20%), kekerasan seksual 535 kasus (52%). Dalam kurun waktu tiga bulan pertama saja pada tahun 2014, Komnas perlindungan anak telah menerima 252 laporan kekerasan pada anak, yang didominasi oleh kejahatan seksual dari tahun 2010-2014 yang berkisar 42-62%. Angka tersebut meningkat setiap tahunnya, terutama pada jumlah kekerasan seksual yang hampir mendominasi dari jumlah keseluruhan. (Setyawan, 2015).

Tabel 1.1 tabel kekerasan kepada anak

No.	Jenis Kekerasan	Jumlah			Persentase (%)		
		Guru	Teman Sekelas	Teman Lain Kelas	Guru	Teman Sekelas	Teman Lain Kelas
1.	Menjewejer	326	226	134	31.8	22	13.1
2.	Mencubit	379	504	316	36.9	49.1	30.8
3.	Menendang	70	261	175	6.8	25.4	17.1
4.	Memukul dengan tangan	118	297	191	11.5	28.9	18.6
5.	Memukul dengan benda	107	208	112	10.4	20.3	10.9
6.	Menghukum hingga jatuh sakit, pingsan	29	23	19	2.8	2.2	1.9
7.	Melukai dengan benda berbahaya	11	36	23	1.1	3.5	2.2
8.	Kekerasan fisik lain	32	49	32	3.1	4.8	3.1
9.	Membandingkan dengan saudara/ anak lain	176	172	130	17.2	16.8	12.7
10.	Membentak dengan suara keras dan kasar	357	357	254	34.8	34.8	24.8
11.	Menghina dihadapan teman/orang lain	133	298	212	13	29.0	20.7
12.	Menyebut "bodoh", "pemalas", "nakal", dsb	226	264	183	22	25.7	17.8
13.	Mencap dengan sebutan jelek/jahat	56	151	108	5.5	14.7	10.5
14.	Kekerasan psikis lainnya	19	25	13	1.9	2.4	1.3

Sumber: KPAI, 2013.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan prevalensi kekerasan terhadap anak adalah 3,02% yang berarti setiap 10.000 anak Indonesia terdapat 302 anak pernah mengalami kekerasan.

Nurul Fauziah, 2018

KESIAPAN TAMAN KANAK KANAK DI KECAMATAN SUKASARI KOTA BANDUNG MENUJU PAUD RAMAH ANAK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kekerasan yang terjadi kepada anak di Indonesia tentu menjadi evaluasi kepada kita semua sebagai pendidik dan orang tua bahwa anak masih minim mendapatkan perlindungan sebagai seorang individu yang dijamin hak-haknya didalam undang-undang, anak masih rentan menerima perlakuan kekerasan yang dapat mengancam keselamatan hidupnya.

Tabel 1.2 pelaku kekerasan terhadap anak

No	Dilakukan Oleh	Jumlah	
		Frekuensi	Persen
1.	Guru	2039	29.9
2.	Teman Se-kelas	2871	42.1
3.	Teman Lain-kelas	1902	27.9

Terbukti dengan adanya temuan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa kekerasan yang terjadi kepada anak hampir 84% atau lebih dari setengah kasus kekerasan terjadi disekolah, ini menunjukkan bahwa kekerasan kepada anak dapat dilakukan oleh siapapun dan kapanpun, bahkan orang-orang yang berada dekat disekeliling anak. Hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, instansi sekolah dan masyarakat tentunya, karena sejatinya setiap anak mempunyai hak yang sama untuk dilindungi dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi yang tidak ia lakukan dengan alasan apapun. Sebab ini dapat berdampak buruk bagi perkembangan dan pertumbuhan anak, terlebih hal ini akan sangat mempengaruhi kondisi kejiwaannya setelah dewasa.

Salah satu upaya dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak adalah penyediaan lingkungan yang layak anak, Layak diartikan sebagai pantas, diperlakukan selayaknya. Layak yang dimaksud adalah kondisi fisik dan psikis suatu wilayah dimana aspek aspek kehidupannya memenuhi unsur unsur yang diatur dalam konvensi hak anak serta undang undang perlindungan anak. Lingkungan tersebut Non diskriminasi, mementingkan Kepentingan yang terbaik untuk anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak, dan tata Pemerintahan yang baik, maka

dibuatlah kebijakan KLA atau Kabupaten/Kota layak anak. (Peraturan advokasi kebijakan KLA kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2015, hlm.3).

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Melalui pengembangan Kabupaten/Kota layak Anak urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no 11 tahun 2011, hlm.6).

Secara Umum kabupaten/kota layak anak bertujuan untuk memenuhi hak dan melindungi anak, dan Secara Khusus Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak / *Convention on the Rights of the Child* dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA) pada suatu wilayah kabupaten/kota. (Peraturan advokasi kebijakan KLA kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2015, hlm.5).

Konvensi tentang Hak-Hak Anak mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Hal-hal sebagaimana dimaksud dapat diwujudkan melalui SRA yang merupakan bagian integral dari upaya pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dimana di dalamnya termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya

pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang secara resmi diberikan penghargaan sebagai Kota layak anak oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sejak tahun 2017. (Ahmad, 2017).

Adapun untuk menjadi Kabupaten/ kota layak anak kota Bandung telah memenuhi 24 indikator Kinerja Kota layak anak, yang diurai pada 135 variabel. SRA merupakan salah satu komponen didalam klaster penilaian atau indikator terpenuhinya Kabupaten/Kota Layak anak, dilihat ditabel indikator Kabupaten/Kota layak anak didalam peraturan menteri negri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, klaster 4.

Sekolah ramah anak yang selanjutnya disingkat SRA lahir dari dua hal besar yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan Negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi Indonesia pada Tahun 1990, juga adanya tuntutan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang jelas pada pasal 54 yang berbunyi : “(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Di ayat dua dinyatakan sebagai berikut : (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.”

SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di

pendidikan. Tujuan disusunnya Kebijakan SRA adalah untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual (Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia. 2014).

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain :

1. Identifikasi model SRA (SRA) jenjang satuan pendidikan anak usia dini se-kecamatan Semarang selatan (kristanto, dkk. 2011).
2. Pengelolaan paud ramah anak berbasis masyarakat melalui pendekatan metakognisi (Elyana, 2011).
3. Upaya kepala sekolah dalam mewujudkan SRA di SD IT Nur Hidayah Surakarta tahun pelajaran 2016/2017 (Ahmad Syafi'ii. 2017)

Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa sekolah paud ramah (baik fisik maupun non fisik) anak merupakan layanan pendidikan anak usia dini yang memberikan pelayanan dengan memenuhi kebutuhan dasar anak, berpihak kepada hak-hak anak dan memberikan perlindungan terhadap anak. Sekolah yang ramah dengan anak diharapkan memberikan kenyamanan kepada anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, yang pada akhirnya anak akan siap menerima informasi dan pengetahuan baru pada saat berinteraksi di lingkungannya, yang nantinya akan menjadi dasar kekuatan dan sportivitas yang membantu anak untuk tumbuh berkualitas di saat dewasanya kelak.

Pada kenyataannya di Kota Bandung berdasarkan data BP3AKB kota Bandung belum ada TK yang sudah ramah anak atau terverifikasi sebagai paud ramah anak, yang seharusnya Bandung sebagai kota layak anak memiliki minimal satu lembaga atau TK ramah anak. Maka dari latarbelakang diatas, penulis bermaksud ingin mengetahui gambaran sejauh mana kesiapan TK di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menuju TK yang ramah anak.

Nurul Fauziah, 2018

KESIAPAN TAMAN KANAK KANAK DI KECAMATAN SUKASARI KOTA BANDUNG MENUJU PAUD RAMAH ANAK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

B. Rumusan Penelitian

Dari latarbelakang diatas, maka didapat rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan TK di Kecamatan Sukasari menuju Paud ramah anak?
2. Apa saja hambatan kesiapan TK di Kecamatan Sukasari dalam Persiapan menuju paud ramah anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kesiapan TK di kecamatan sukasari menuju SRA.
2. Mendeskripsikan pengimplentasian dan hambatan penerapan SRA di TK di Kecamatan Sukasari Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pendidikan khususnya dalam implementasi konsep SRA.
 - b. Memberikan pemahaman tentang konsep SRA dan indikator SRA
 - c. Menjadi tolak ukur dalam pencapaian program SRA.
2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya, menjadi acuan bagi lembaga lembaga paud dalam penyelenggaraan sekolah layak anak, menjadi rujukan bahan penyusunan mengeluarkan kebijakan kebijakan di lembaga atau dinas terkait.

E. Struktur organisasi skripsi

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka perlu peneliti sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum laporan penelitian. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I berisi Latar Belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi penelitian.

BAB II, berisi tentang kajian pustaka yang memuat tentang konsep kesiapan, konsep anak, konsep SRA, dan Satuan Pendidikan Anak usia dini (PAUD).

BAB III, berisi tentang metodologi penelitian yang memuat variable penelitian, devinisi operasional, lokasi, populasi dan sampel penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV berisi tentang pembahasan yang memuat temuan penelitian berdasarkan hasil pengelolaan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V berisis kesimpulan dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan TK di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menuju paud ramah anak. TK yang dimaksud adalah lembaga formal dalam jenjang pendidikan anak usia dini , hasil penelitian disajikan sebagai berikut.

1. Kesiapan TK di Kecamatan Sukasari menuju PAUD Ramah Anak (SRA).

Setelah dilakukan pengambilan dan pengolahan data dari responden yang berjumlah 17 sekolah, dengan total item pernyataan angket sebanyak 92 butir pernyataan dan telah dikualifikasi menjadi 6 bagian atau 6 aspek yang terdiri dari

Nurul Fauziah, 2018

KESIAPAN TAMAN KANAK KANAK DI KECAMATAN SUKASARI KOTA BANDUNG MENUJU PAUD RAMAH ANAK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penerapan kebijakan SRA (SRA), pelaksanaan kurikulum, guru dan perangkat sekolah, sarana prasarana, partisipasi anak dan orang tua, dan terahir peran lembaga /masyarakat sekitar dengan komposisi kebijakakan SRA sebesar 23,91% Kurikulum 11,95% , Perangkat sekolah 4,34% , Sarana prasarana 45,6% , Peran anak dan ortu 10,8% , Peran masyarakat 1,08%.

Pada aspek kebijakan SRA terdapat 22 item pernyataan yang menjadi indikator SRA atau sebesar 23,9% dari total item pernyataan instrument penelitian. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1

Kesiapan TK dilihat dari kebijakan SRA

Responden	Penilaian	
	YA	TIDAK
SP 1	17	4
SP2	13	8
SP3	17	4
SP4	12	9
SP5	19	2
SP6	11	10
SP7	19	2
SP8	14	7
SP9	13	8
SP10	14	7
SP11	13	8
SP12	17	4
SP13	17	4
SP14	17	4
SP15	18	3
SP16	18	3
SP17	13	8
Total skor	262	95

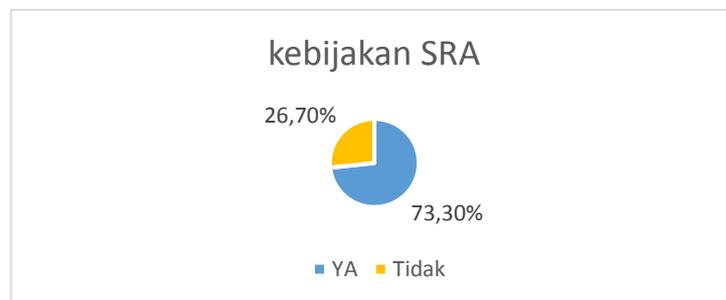
Persentase	73,3%	26.7%
-------------------	-------	-------

Keterangan :

SP = TK yang di observasi

Jika digambarkan dalam bentuk diagram kesiapan TK di Kecamatan Sukasari Kota Bandung dapat dilihat dari diagram sebagai berikut.

Diagram 4.1
kesiapan TK di Kecamatan Sukasari menuju PAUD ramah anak dilihat dari aspek kebijakan SRA



Pada diagram 4.1 dapat dikemukakan bahwa persentase kesiapan TK di Kecamatan Sukasari Kota Bandung Menuju Paud ramah anak dilihat dari kebijakan SRA sebesar 74% sudah siap dalam aspek Kebijakan SRA, sisa nya sekitar 26% belum siap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesiapan TK di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menuju PAUD ramah anak dilihat dari aspek kebijakan SRA berada pada kategori sangat siap.

2. Kesiapan TK di Kecamatan Sukasari menuju PAUD Ramah anak dilihat dari aspek kurikulum .

Data kedua yang diolah adalah kesiapan TK di Kecamatan Sukasari kota Bandung menuju PAUD ramah anak dilihat dari aspek pelaksanaan kurikulum. Pada bagian ini terdapat 11 item pernyataan yang menjadi indikator SRA. Atau sekitar 11,95% dari total item pernyataan keseluruhan instrument penelitian. Terdapat total skor 173 point untuk penilaian jawaban “Ya” dan 14 point “ tidak” .

Tabel 4.2
Kesiapan TK dilihat dari kebijakan SRA

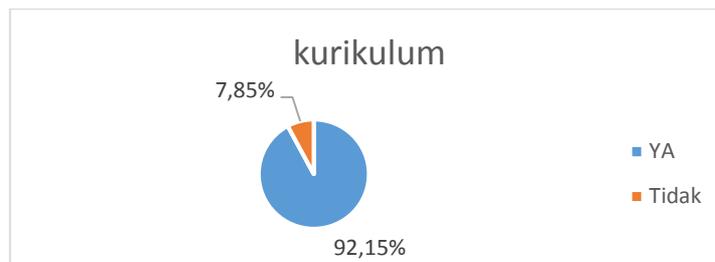
Responden	Penilaian	
	YA	TIDAK
SP 1	12	0
SP2	9	3
SP3	12	0
SP4	12	0
SP5	12	0
SP6	9	3
SP7	12	0
SP8	12	0
SP9	12	0
SP10	6	6
SP11	10	2
SP12	12	0
SP13	13	0
SP14	11	1
SP15	12	0
SP16	12	0
SP17	11	1
Total skor	188	16
Persentase	92,15%	7,85%

Keterangan :

SP =TK yang di observasi

Jika digambarkan dalam bentuk diagram kesiapan TK di Kecamatan Sukasari Kota Bandung dapat dilihat dari diagram sebagai berikut.

Diagram 4.2
kesiapan TK di Kecamatan Sukasari menuju PAUD ramah anak dilihat dari
aspek kurikulum.



Pada diagram 4.2 dapat dilihat bahwa persentase kesiapan TK di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menuju PAUD ramah anak dilihat dari aspek kurikulum sebesar 92.5% sudah siap dan 7.5% belum siap. Maka dapat disimpulkan bahwa kesiapan TK di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menuju PAUD ramah anak dilihat dari aspek kurikulum berada pada kategori sangat siap.

3. Kesiapan TK di Kecamatan Sukasari menuju PAUD Ramah anak dilihat dari aspek Tenaga Pendidik dan perangkat Sekolah.

Terdapat 4 item pernyataan dalam aspek ini atau sekitar 4,34% dari total item pernyataan instrument. Berbeda dengan aspek aspek sebelumnya item pernyataan pada aspek ini lebih sedikit, dan hasilnya lebih dari 60% TK ternyata belum siap dalam aspek tenaga pendidik dan perangkat sekolah. Dan baru sekitar 39% TK yang tenaga pendidik serta perangkat sekolahnya sudah siap menjadi PAUD ramah anak.

Tabel 4.3
Kesiapan TK dilihat dari aspek Tenaga Pendidik dan Perangkat
sekolah.

Responden	Penilaian	
	YA	TIDAK
SP 1	4	0
SP2	0	4
SP3	2	2

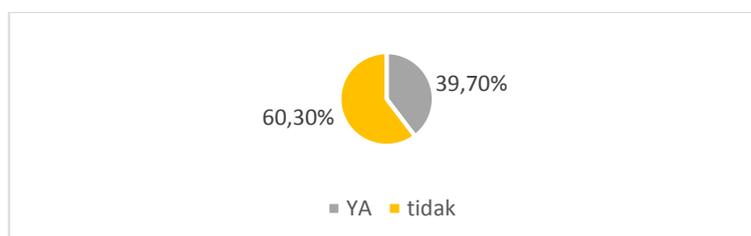
SP4	0	4
SP5	3	1
SP6	0	4
SP7	0	4
SP8	2	2
SP9	1	3
SP10	2	2
SP11	0	4
SP12	3	1
SP13	4	0
SP14	0	4
SP15	3	1
SP16	3	1
SP17	0	4
Total skor	27	41
Persentase	39.7%	60.3%

Keterangan : SP TK yang di observasi

Jika digambarkan dalam bentuk diagram , kesiapan TK di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menuju PAUD ramah anak, adalah sebagai berikut.

Diagram 4.3

Kesiapan TK di Kecamatan Sukasari menuju PAUD ramah anak dilihat dari aspek Tenaga Pendidik dan Perangkat sekolah .



Maka dapat dilihat dari diagram 4.3 sebesar 60.30% TK belum siap menjadi PAUD ramah anak dalam aspek tenaga pendidik dan perangkat sekolah. Dan baru sekitar 39.7% yang sudah siap, artinya pada aspek tersebut kesiapan TK di kecamatan

Sukasari Kota Bandung menuju PAUD ramah anak berada pada kategori kurang siap.

4. Kesiapan TK di Kecamatan Sukasari menuju PAUD Ramah anak dilihat dari aspek Sarana dan Prasarana.

Pada aspek Sarana dan Prasarana terdapat 42 item pernyataan, dengan persentase sebesar 45,6% dari total item pernyataan instrument. total skor 446 pada jawaban “ Ya” dan 268 pada jawaban “ tidak”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4

Kesiapan TK dilihat dari aspek Sarana dan Prasarana

Responden	Penilaian	
	YA	TIDAK
SP 1	35	7
SP2	15	27
SP3	24	18
SP4	26	16
SP5	31	11
SP6	18	24
SP7	33	9
SP8	20	22
SP9	25	17
SP10	18	24
SP11	23	19
SP12	27	15
SP13	29	13
SP14	25	17
SP15	37	5
SP16	40	2
SP17	20	22
Total skor	446	268

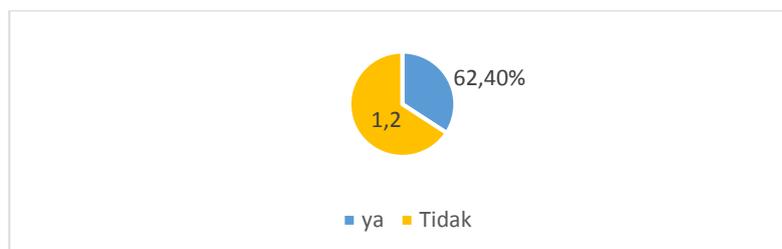
Persentase	62.4%	37.6%
-------------------	-------	-------

Keterangan : SP =TK yang di observasi

Dapat dilihat dari tabel diatas, dengan akumulasi 62.4% TK sudah siap dalam aspek sarana dan Prasarana, sisanya sekitar 37.6% belum siap. Maka kesiapan TK pada aspek sarana prasarana ada pada kategori Siap. Jika digambarkan dalam bentuk diagram , kesiapan TK di Kecamatan Sukasari menuju PAUD ramah anak dilihat dari aspek Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut.

Diagram 4.4

Kesiapan TK di Kecamatan Sukasari menuju PAUD ramah Anak dilihat dari aspek sarana dan Prasarana.



5. Kesiapan TK di Kecamatan Sukasari menuju PAUD Ramah anak dilihat dari aspek Peran Anak dan Peran Orang tua.

Total item pernyataan dalam aspek peran anak dan peran orang tua sebanyak 10 item dari total keseluruhan persentase 10,8% item instrument. Secara akumulasi skor untuk jawaban“ ya” 133 skor, dan untuk jawaban “ tidak “ berjumlah 37. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5

Nurul Fauziah, 2018

KESIAPAN TAMAN KANAK KANAK DI KECAMATAN SUKASARI KOTA BANDUNG MENUJU PAUD RAMAH ANAK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kesiapan TK dilihat dari aspek Peran anak dan Peran Orang tua

Responden	Penilaian	
	YA	TIDAK
SP 1	9	1
SP2	7	3
SP3	8	2
SP4	7	3
SP5	8	2
SP6	6	4
SP7	8	2
SP8	7	3
SP9	8	2
SP10	6	4
SP11	8	2
SP12	8	2
SP13	10	0
SP14	8	2
SP15	8	2
SP16	9	1
SP17	8	2
Total skor	133	37
Persentase	78,2%	21.8%

Keterangan : SP =TK yang di observasi

Dapat dilihat pada tabel diatas, 78.2% TK di Kecamatan Sukasari dikategorikan sudah siap pada aspek peran anak dan orang tua dalam mewujudkan SRA. hanya sekitar 21.8% yang belum siap pada aspek ini, maka dapat disimpulkan kesiapan TK di Kecamatan Sukasari pada aspek peran anak dan orang tua berada pada kategori sangat siap. Lebih lanjutnya jika digambarkan dalam bentuk diagram, kesiapan TK di Kecamatan Sukasari menuju PAUD ramah anak dari aspek peran anak dan orang tua dapat dilihat pada diagram dibawah ini.

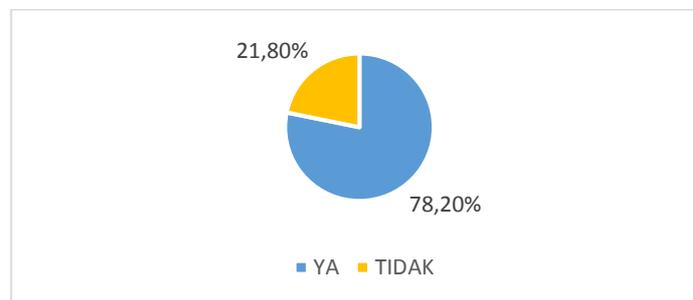
Diagram 4.5

Nurul Fauziah, 2018

KESIAPAN TAMAN KANAK KANAK DI KECAMATAN SUKASARI KOTA BANDUNG MENUJU PAUD RAMAH ANAK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kesiapan TK di Kecamatan Sukasari Menuju PAUD ramah Anak dilihat dari Aspek peran anak dan Peran orang tua.



6. Kesiapan TK di Kecamatan Sukasari menuju PAUD Ramah anak dilihat dari aspek Peran masyarakat dan pemangku kebijakan lainnya.

Pengolahan data yang terakhir yaitu pada bagian aspek peran masyarakat dan pemangku kebijakan lainnya dalam mewujudkan kesiapan PAUD ramah anak di Kecamatan Sukasari kota Bandung. Pada aspek ini hanya terdapat satu item pernyataan atau sebesar 1,08% dari total item pernyataan penelitian, dengan skor akumulasi 100%. Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6

Kesiapan TK dilihat dari aspek Peran masyarakat dan pemangku kebijakan lainnya.

Responden	Penilaian	
	YA	TIDAK
SP 1	1	0
SP2	1	0
SP3	1	0
SP4	1	0
SP5	1	0
SP6	1	0
SP7	1	0
SP8	1	0
SP9	1	0
SP10	1	0
SP11	1	0

SP12	1	0
SP13	1	0
SP14	1	0
SP15	1	0
SP16	1	0
SP17	1	0
Total skor	17	0
Persentase	100%	0%

Keterangan : SP TK yang di observasi.

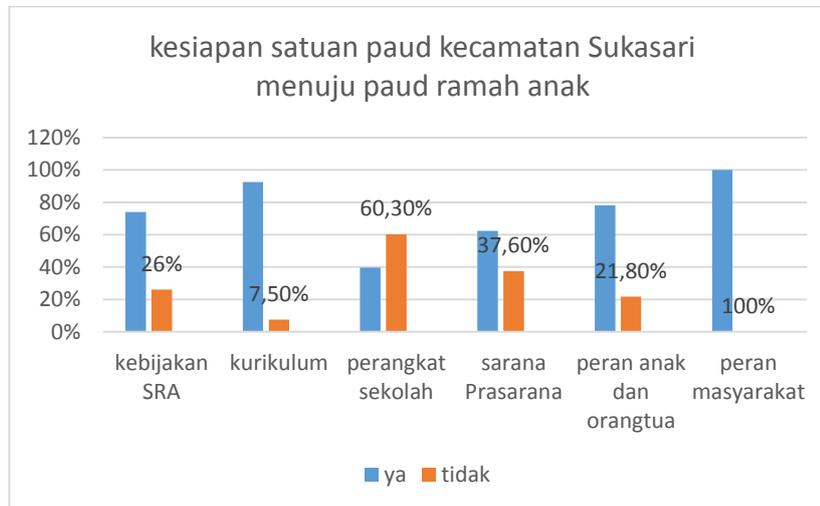
Setelah seluruh data diolah, maka akan tampak hasil dan perbedaan persentase Kesiapan TK di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menuju PAUD ramah anak dalam 6 aspek.

Tabel 4.7

Kesiapan TK di Kecamatan Sukasari menuju PAUD ramah anak dalam berbagai aspek.

ASPEK	YA	TIDAK	KATEGORI
Kebijakan SRA	74.6%	25,4%	Siap
Kurikulum	92.5%	7.5%	Sangat siap
Tenaga Pendidik dan Perangkat Sekolah	39.7%	60.3%	Kurang siap
Sarana dan Prasarana	62.4%	37.6%	Siap
Peran Anak dan Orang Tua	78.2%	21.8%	Sangat siap
Peran Masyarakat dan Pemangku kebijakan lainnya.	100%	0%	Sangat siap

Diagram 4.6
kesiapan TK di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menuju PAUD ramah anak



Dapat dilihat dari diagram 4.6 akumulasi setiap aspek yang menjadi indikator kesiapan PAUD Sukasari menuju PAUD ramah anak. sebesar 73,3% sudah siap dan 26,7% belum siap pada aspek kebijakan SRA berada pada kategori sangat siap, pada aspek Kurikulum sebesar 92,15% sudah siap, dan 7,85% belum siap berada pada kategori sangat siap. Pada aspek tenaga pendidik dan perangkat sekolah sekitar 39,7% sudah siap, dan 60,3% belum siap berada kategori kurang siap. Pada aspek sarana dan Prasarana 62,4% sudah siap, 37,60% belum siap. Pada aspek peran anak dan orang tua sekitar 78,2 % sudah siap, sisa 21,8% belum siap berada pada kategori siap, dan aspek terakhir yang memiliki persentase kesiapan paling tinggi karena telah mencapai 100% yaitu peran masyarakat dan pemangku kebijakan lainnya dalam mewujudkan PAUD di Kecamatan Sukasari kota Bandung yang siap menjadi PAUD ramah anak. Diagram 4.6 menunjukkan perbedaan persentase kesiapan pada setiap aspeknya, persentase tertinggi dari ke enam aspek terdapat pada aspek peran masyarakat sekitar dan pemangku kebijakan dan persentase paling rendah pada aspek tenaga pendidik dan Perangkat sekolah.

Kesiapan TK menjadi faktor penting, karena untuk menentukan persentase Kesiapan TK di suatu Kecamatan atau suatu Populasi, maka perlu ditentukan kesiapan di satuan sampelnya. Berikut adalah rekapitulasi nilai instrument pernyataan dari setiap TK di Kecamatan Suksasari .

Nurul Fauziah, 2018

KESIAPAN TAMAN KANAK KANAK DI KECAMATAN SUKASARI KOTA BANDUNG MENUJU PAUD RAMAH ANAK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 4.8
Rekapitulasi nilai instrument PAUD ramah anak

No.	Nama	Item		Persentase	kategori
		TK	Ya		
1.	SP16	85	7	92,4%	Sangat siap
2.	SP15	81	11	88,04%	Sangat siap
3.	SP1	80	12	87%	Sangat Siap
4.	SP5	76	16	83%	Sangat siap
5.	SP7	75	17	82%	Sangat siap
6.	SP13	75	17	82%	Sangat siap
7.	SP12	70	22	76,1%	Sangat siap
8.	SP3	66	26	72%	Siap
9.	SP14	64	28	69,6%	Siap
10.	SP9	61	31	66.3%	Siap
11.	SP4	60	32	65,2%	Siap
12.	SP8	57	35	62%	Siap
13.	SP11	56	36	60,9%	Siap
14.	SP17	55	37	59,8%	Siap
15.	SP10	49	43	53,3%	Siap
16.	SP6	47	45	51,1%	Siap
17.	SP2	46	46	50%	Kurang siap
Jumlah SP yang sangat siap				7	41.1%
Jumlah SP yang siap				9	52.9%
Jumlah SP yang kurang siap				1	0,05%

Mengacu pada kategori interpretasi kesiapan menurut purwanto (2008) TK di Kecamatan Sukasari berada pada kategori siap. Karena sudah mencapai 52,9% dari total keseluruhan yang sudah siap.

B. Pembahasan

1. Kesiapan PAUD di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menuju PAUD ramah anak dilihat dari aspek kebijakan SRA.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan sebelumnya, bahwa kesiapan TK di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menuju PAUD ramah anak mencapai 74% dilihat dari aspek Kebijakan SRA, Persentase tersebut berada pada kategori siap. Siap disini artinya TK di Kecamatan Sukasari sudah memiliki komitmen dalam mewujudkan TK yang ramah anak.

Adapun item item pernyataan yang menjadi indikator kesiapan TK menjadi PAUD ramah anak dalam penelitian ini adalah sebagai berikut .

1. Memiliki komitmen tertulis dalam bentuk ikrar/peraturan/informasi yang dipampang untuk mencegah kekerasan terhadap anak berbentuk seperti pakta integritas.
2. Menjamin dan memenuhi hak anak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama.
3. Proses pembelajaran tidak bias gender (penghormatan kepada sesama anak).
4. Melaksanakan proses pembelajaran dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang, dan bebas dari perlakuan diskriminasi.
5. Memberikan informasi yang akurat, tidak memihak mengenai masyarakat dan budaya sekitar.
6. Memiliki komitmen untuk mewujudkan sekolah tanpa asap rokok.
7. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok dan zat aditif.
8. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza.
9. Memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah aman dari bencana secara structural dan non struktural.
10. Melaksanakan pembelajaran yang ramah anak dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang memperhatikan anak.
11. Tersedia sarana evakuasi berupa sistem peringatan bahaya dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu pengarah menuju ke tempat berkumpul yang aman
12. Melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik dengan melakukan pencegahan dan

penanganan terhadap semua bentuk kejahatan seksual dan kekerasan terhadap peserta didik (fisik atau mental atau perlakuan salah atau penelantaran atau perlakuan menelantaran atau eksploitasi).

13. Melakukan sosialisasi kepada seluruh warga satuan pendidikan untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi terhadap peserta didik khususnya penyandang disabilitas
14. Penegakan disiplin dengan non kekerasan
15. Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak, dan POMG/.
16. Melaksanakan proses pembelajaran ramah anak dengan melakukan pembelajaran yang dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas.
17. Menyediakan dan melaksanakan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang mengembangkan keragaman karakter dan potensi peserta didik
18. Sekolah mewajibkan anak membawa bekal yang sehat dan bergizi.
19. Sekolah menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal: langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, slogan yang bermakna himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat.
20. Menjamin, melindungi dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.
21. sekolah memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA (misal: simbol - dilarang merokok, dilarang *bullying*; tanda – titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas, dll)

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa hampir seluruh item pernyataan indikator kesiapan PAUD ramah anak setiap TK sudah siap dan sudah memenuhi kiriteria, meski dengan kualitas yang berbeda tentunya. Akan tetapi sangat disayangkan temuan di lapangan dari 17 TK yang telah di observasi belum satupun PAUD telah mengimplementasikan komitmen tersebut dengan mendeklarasikan diri, membuat pakta integritas atau papan informasi yang menyatakan bahwa mereka sudah berkomitmen untuk mewujudkan TK yang ramah anak. Temuan

tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara kepada kepala bidang SRA di BP3AKB kota Bandung, Bu Kristin. Beliau mengatakan bahwa sejauh ini memang kota Bandung masih dalam tahap pensosialisasian mengenai SRA, adapun data yang dimiliki oleh BP3AKB hanya ada SD, SMP dan SMA yang sudah terverifikasi dan resmi menjadi rujukan SRA.

Hakikatnya SRA adalah memastikan bahwa di dalam lingkungan sekolah anak mendapatkan haknya, serta mendapat perlindungan. Ketika anak bersekolah, anak sudah mendapatkan haknya atas pendidikan, namun hak atas pendidikan itu tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip KHA. Salah satu tujuan disusunnya kebijakan SRA adalah untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa TK mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta dapat mempersiapkan anak untuk menjadi anak yang bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.

Lembaga PAUD sebagai tempat pengasuhan anak, tidak sekedar pada kegiatan makan, minum, ataupun menjaga anak, tetapi dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan otak. Tumbuh kembang dan kecerdasan anak usia dini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Gizi dan Kesehatan, Stimulasi Psikososial, Pengasuhan, Pendidikan dan perlindungan (Fasli Jalal, 2010).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa selain di rumah, tempat anak-anak banyak mengalami kekerasan adalah sekolah. Kekerasan dalam pendidikan merupakan perilaku melampaui batas kode etik dan aturan dalam pendidikan, baik dalam bentuk fisik maupun pelecehan atas hak seseorang. Pelakunya bisa siapa saja, seperti pimpinan sekolah, guru, staf, murid, orang tua atau wali murid, bahkan masyarakat.

Kebanyakan orang menganggap kekerasan hanya dalam konteks sempit, yang biasanya berkaitan dengan perang, pembunuhan, atau kekacauan, padahal kekerasan itu bentuknya bermacam-macam. Secara umum, terdapat empat jenis kekerasan pokok yang memenuhi dua kriteria tersebut (Jamil Salmi, 2005:32), yakni: kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan tidak langsung (*indirect*

violence), kekerasan represif (*repressive violence*), dan kekerasan alienatif (*alienating violence*).

Kekerasan langsung merujuk pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung. Kekerasan tidak langsung adalah tindakan yang membahayakan manusia, bahkan sampai ancaman kematian, Kekerasan represif berkaitan dengan pencabutan hak-hak dasar selain hak untuk bertahan hidup dan hak untuk dilindungi dari kesakitan atau penderitaan. Kekerasan alienatif merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi.

Menurut Ahimsa Putra (1985. Hlm. 203) secara sederhana tindak kekerasan diartikan sebagai setiap perilaku seseorang yang dapat menyebabkan perasaan atau tubuh (fisik) orang lain menjadi tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini bisa berupa kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, ketersinggungan, kejengkelan, atau kemarahan, sedangkan keadaan fisik yang tidak nyaman bisa berupa: lecet, luka, memar, patah tulang, dan sebagainya. Kekerasan yang dialami oleh anak-anak dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni: (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan mental, dan (3) kekerasan seksual. Sebagai gejala sosial budaya, tindak kekerasan terhadap anak tidak muncul begitu saja dalam situasi yang kosong atau netral. Ada kondisi kondisi budaya tertentu dalam masyarakat, yakni berbagai pandangan, nilai dan norma sosial yang memudahkan terjadinya atau mendorong dilakukannya tindak kekerasan tersebut.

Kebijakan SRA yang dimaksud pada tahap kesiapan merupakan bentuk upaya awal sekolah untuk menciptakan SRA, upaya upaya tersebut dituangkan dalam item pernyataan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dalam berbagai aspek, seperti keamanan, kenyamanan, keselamatan, kebersihan, kesehatan, seta terhindar dari perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan selama anak berada disekolah. Semua upaya-upaya yang dituangkan dalam item pernyataan indikator SRA kemudian wajib dimiliki oleh TK dalam rangka upaya sekolah tersebut menjadi PAUD ramah anak, salah satu item yang pokok dan penting adalah TK harus sudah memiliki komitmen menjadi PAUD ramah anak, dibuktikan dengan deklarasi bahwa PAUD tersebut siap menjadi PAUD ramah anak, Isi Kebijakan bisa berupa deklarasi bersama, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan tertulis

di satuan pendidikan, Jika dimungkinkan turut menandatangani adalah Wakil dari Dinas Pendidikan, Penandatanganan komitmen ini dapat difasilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan atau pihak yang berkepentingan lainnya. (Bidang Perlindungan anak dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak .2017).

Komitmen menjadi unsur utama dan pertama dalam mewujudkan TK ramah anak, karena dengan adanya komitmen yang di informasikan secara luas dalam bentuk pakta integritas dan papan informasi semua pihak yang terlibat dan warga sekolah dimulai dari pendidik, anak didik, kepala sekolah, perangkat sekolah lainnya hingga orang tua akan dengan sendirinya memiliki tanggung jawab dan menanamkan komitmen tersebut pada dirinya masing masing. Bagaimana seharusnya sekolah menjadi sekolah yang ramah dan menyenangkan untuk anak, bagaimana guru bersikap ramah dan menyenangkan kepada anak, pun orang tua dan perangkat sekolah lain seperti penjaga sekolah. . (Bidang Perlindungan anak dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak . 2017)

Bentuk-bentuk upaya sekolah tersebut diatas juga seharusnya sudah dilakukan oleh TK di Kecamatan Sukasari, mengingat TK juga memiliki kewajiban dalam melindungi dan memenuhi hak hak anak di sekolah dalam berbagai aspek. Akan tetapi karena keadaan dilapangan menunjukkan bahwa TK di Kota Bandung khususnya di Kecamatan Sukasari memang belum ramah anak, SRA pun masih menjadi isu baru yang memerlukan pensosialisasian yang maksimal agar semua elemen pemerintah dan sekolah dapat memiliki kesadaran akan pentingnya SRA, hal ini tentu menjadi PR bersama baik pihak sekolah, guru, dan pemangku kebijakan lainnya dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan TK ramah anak.

2. Kesiapan PAUD di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menuju PAUD ramah anak dilihat dari aspek kurikulum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan sebelumnya, bahwa kesiapan TK di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menuju PAUD ramah anak mencapai 92.15% dilihat dari aspek Kurikulum, Persentase tersebut berada pada

Nurul Fauziah, 2018

KESIAPAN TAMAN KANAK KANAK DI KECAMATAN SUKASARI KOTA BANDUNG MENUJU PAUD RAMAH ANAK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kategori sangat siap. Siap disini artinya TK di Kecamatan Sukasari sudah sangat sesuai dengan kriteria yang di perlukan dalam membentuk PAUD ramah anak dilihat dari aspek kurikulum. Adapun item item pernyataan yang menjadi indikator kesiapan TK menjadi PAUD ramah anak dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengintegrasikan materi kesehatan didalam proses pembelajaran
2. Mengintegrasikan materi lingkungan hidup didalam proses pembelajaran.
3. Anak terlibat dalam kegiatan bermain, berolahraga dan diberikan kesempatan untuk beristirahat.
4. Memberikan pembelajaran yang dapat membangkitkan wawasan dan rasa kebangsaan bagi anak.
5. Penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak.
6. Penilaian pembelajaran dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan penilaian otentik.
7. Melakukan pembelajaran yang dapat emotivasi Peserta didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni.
8. Melakukan pembelajaran yang menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran.
9. Penelihan hasil belajar mengacu pada hak anak : Menerapkan penilaian pembelajaran tanpa membandingkan satu peserta didik dengan peserta didik yang lain.
10. Melaksanakan proses pembelajaran yang memotivasi peserta didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni
11. Melaksanakan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelenggarakan, mengikuti, mengapresiasi kegiatan seni budaya.
12. Melaksanaan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan minat, bakat, dan inovasi serta kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok

Temuan dilapangan menunjukan bahwa Kurikulum TK di kecamatan Sukasari sudah sangat sesuai dengan kriteria PAUD ramah anak, ini dikarenakan secara keseluruhan pendidik dan Kepala sekolah sudah menguasai dan memahami

kurikulum yang seharusnya untuk anak usia dini. Soemiarti (2003.hlm. 35) mengemukakan bahwa kurikulum merupakan seluruh usaha/kegiatan sekolah untuk merangsang anak supaya belajar dalam rangka pengembangan seluruh aspek yang ada pada dirinya, baik di dalam maupun di luar kelas serta di lingkungan sekitarnya.

Kurikulum bagi pendidikan anak usia dini dirancang untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak pada segala aspek perkembangan. Seorang guru merencanakan pembelajaran dengan menuangkan ide-idenya secara tertulis, menyusunnya melalui pemilihan topik atau tema dalam kurun waktu perhari atau perminggu. Hal ini dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan bermain yang menyenangkan baik di dalam kelas, di halaman sekolah maupun di luar sekolah. Sesuai dengan pendapat Sujiono (2009, hlm. 198) bahwa kurikulum berisi seperangkat kegiatan belajar melalui bermain yang dapat memberikan pengalaman langsung bagi anak dalam rangka mengembangkan seluruh potensi perkembangan yang dimiliki oleh setiap anak.

TK dalam penyelenggaraan pembelajaran menggunakan kurikulum 2013, yang tentunya tetap diadaptasi dengan kebutuhan dan kekhasan masing-masing PAUD. Landasan filosofis Kurikulum 2013 PAUD menggambarkan bahwa Kurikulum 2013 PAUD merupakan rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa. Melalui kurikulum 2013 PAUD pengalaman belajar anak dilakukan dengan mengenalkan beragam budaya yang dimiliki Indonesia (Suminah, dkk, 2015, hlm. 4). Berdasarkan landasan filosofi tersebut, kurikulum 2013 PAUD diharapkan menjadi landasan mereka untuk memiliki kompetensi diri yang diperlukan dimasa kini dan masa mendatang. Pengalaman belajar anak dilakukan melalui bermain agar adanya kebermaknaan pada setiap diri individu anak. Anak diharapkan mengenal, peduli, menyayangi dan menimbulkan rasa kebanggaan terhadap budaya bangsa. Selain itu mereka dapat mengembangkan potensi dirinya secara kreatif dalam rangka melestarikan ragam budaya yang dimiliki Indonesia.

Dalam pengimplementasian Kurikulum di TK, ada beberapa prinsip yang perlu diterapkan sebagai bentuk upaya dari pemenuhan hak- hak anak, yang tercantum didalam KHA Pasal 29 (1) menyebutkan pendidikan anak diarahkan

untuk pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi sepenuhnya; pengembangan sikap menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa. pengembangan sikap menghormati kepada orangtua anak, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilai, nilai-nilai nasional negara tempat anak bermukim, dan penghormatan kepada peradaban yang berbeda; penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat dalam semangat saling pengertian, damai, toleransi, kesetaraan gender, dan persahabatan antar semua bangsa, suku bangsa, dan agama, termasuk anak dari penduduk asli; dan pengembangan rasa hormat pada lingkungan alam. Kemudian Pasal 31 menegaskan bahwa Negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, terlibat dalam kegiatan bermain, dan turut serta dalam kehidupan budaya dan seni. Selain itu, Negara menghormati dan mempromosikan hak anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan seni. Poin penting dari Pasal 28, 29, dan 31 Konvensi Hak Anak adalah:

1. Pendidikan berpusat pada anak, penegakan disiplin dengan memperhatikan martabat dan harga diri anak, dan pengembangan kapasitas anak.
2. Pengembangan keterampilan, pembelajaran, kemampuan lainnya, martabat manusia, harga diri, dan kepercayaan diri.
3. Pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan untuk hidup dalam kehidupan di masyarakat.
4. Hak anak untuk pendidikan tidak hanya masalah akses, tetapi konten; dan
5. Hak anak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Kurikulum berkaitan erat dengan pembelajaran, kurikulum yang baik akan menghasilkan output yang baik pula. Kurikulum merupakan sebuah system yang didalamnya memiliki komponen yang saling berkaitan erat satu dengan yang lain. Diek dan Carey (dalam Asmawati, 2014, hlm. 19) menegaskan bahwa ada empat komponen kurikulum, yaitu tujuan, isi atau materi, metode/kegiatan, dan evaluasi atau penilaian. Maka item-item pernyataan yang menjadi indikator SRA adalah bentuk upaya dalam mengamalkan konvensi Hak hak anak.

Hasil observasi dilapangan TK di Kecamatan Sukasari sudah cukup baik dalam kesiapan Kurikulum yang ramah anak, meski ada beberapa TK yang blm sesuai dalam beberapa aspek seperti dari segi penilaian hasil belajarnya, terdapat 2

TK atau sekitar 11% dari keseluruhan TK yang masih menggunakan dan menerapkan penilaian akhir berbasis hasil atau biasa disebut ujian akhir.

Menurut Nugraha (2010. Hlm 5) penilaian dapat diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran. Penilaian pada pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah upaya mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan berbagai informasi yang tentang kinerja dan kemajuan berbagai aspek perkembangan yang dapat dicapai oleh anak setelah mengikuti kegiatan pembiasaan dalam kurun waktu tertentu. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak (Kemdiknas. 2010).

Hasil wawancara dengan guru dan kepala sekolah yang bersangkutan mereka mengatakan bahwa tujuan TK tersebut masih menggunakan sistem penilaian berbasis hasil adalah untuk melihat seberapa persen keberhasilan anak dalam menguasai seluruh materi yang telah diberikan oleh sekolah, jadi TK tersebut mengevaluasi keseluruhan materi yang telah diberikan selama satu semester kepada anak dan menilai seberapa besar kemampuan anak dalam menguasai materi-materi tersebut. Sebetulnya maksud dan tujuan dari TK tersebut dapat diterima, hanya caranya yang kurang tepat dan kurang sesuai, TK tersebut juga masih sering menggunakan paper test, atau test menggunakan kertas dan pensil yang tidak tepat untuk diterapkan di PAUD.

Didalam Kurikulum 2013 PAUD dijelaskan mengenai Penilaian pada anak usia dini. Berdasarkan Kurikulum 2013 penilaian PAUD terdiri dari 3 macam, yaitu anekdot, Checklist dan hasil karya. Penilaian lebih menekankan pada potensi yang dimiliki oleh anak didik dengan memantau pembelajaran baik dari kemajuan, hasil hingga perbaikan belajar secara berkesinambungan (Kemdikbud, 2015). penilaian yang dilakukan oleh pendidik yaitu dengan pendekatan autentik (*Authentic Assessment*). Menurut Morrison, ciri-ciri penilaian autentik adalah:

- a. Berdasarkan kurikulum; anak dinilai berdasarkan apa yang mereka pelajari dan kerjakan.
- b. Merupakan proses kerja sama dalam melibatkan anak, guru dan orang tua yakni dalam proses penilaian yang *kooperatif* dan *kolaboratif*; tujuannya adalah membuat penilaian yang berpusat pada anak.
- c. Merupakan bagian dari proses belajar.

- d. Menilai anak secara menyeluruh, bukan hanya dari penguasaan keterampilan.
- e. Penilaian yang berkelanjutan sepanjang tahun ajaran
- f. Menilai anak dan karya mereka yang sebenarnya dengan menggunakan contoh karya, portofolio, performa, jurnal, proyek, dan observasi guru.
- g. Mempertimbangkan kebutuhan khusus menyangkut bahasa, budaya dan kebutuhan khusus lainnya.
- h. Menggunakan sejumlah cara yang berbeda untuk menentukan prestasi anak dan apa yang mereka ketahui dan mampu lakukan.

Keadaan dilapangan tidak menunjukkan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kurikulum yang ramah anak, karena sejauh ini semua komponen didalam kurikulum yang digunakan sekolah sudah cukup baik seperti perencanaan , metode, materi dll. Hanya mungkin sedikit saja yang masih menjadi hambatan yaitu dalam komponen penilaian/ evaluasi, karena setiap TK tentu memiliki output output yang ingin dicapai sehingga dalam pelaksanaa penilaianpun pasti akan berbeda-beda.

3. Kesiapan PAUD di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menuju PAUD ramah anak dilihat dari aspek tenaga Pendidik dan perangkat sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan sebelumnya, bahwa kesiapan TK di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menuju PAUD ramah anak hanya mencapai 39,70%% dilihat dari aspek Tenaga pendidik dan perangkat sekolah , Persentase tersebut berada pada kategori kurang siap. Adapun item item pernyataan yang menjadi indikator kesiapan TK menjadi PAUD ramah anak dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pendidik dan tenaga kependidikan berkualifikasi guru S1/D4 (sesuai SPM).
2. Pelatihan hak-hak anak warga sekolah.
3. Pelatihan hak-hak anak bagi Orangtua/wali.
4. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak hak anak

Hasil temuan dilapangan menyatakan bahwa tenaga pendidik atau guru TK di Kecamatan sukasari hanya sekitar 35,2% nya telah berkualifikasi S1, itupun tidak semua adalah lulusan pendidikan guru PAUD, kemudian untuk tenaga pendidik

yang sudah terlatih hak-hak anak atau sudah pernah mendapatkan sosialisasi/pematerian mengenai hak-hak anak adalah sekitar 52,9% saja, untuk orang tua sekitar 23,5% nya saja yang sudah terlatih atau mengetahui mengenai hak-hak anak, dan yang terakhir untuk tenaga pendidik atau kependidikan disekolah yang sudah terlatih atau mengetahui hak-hak anak hanya mencapai 47% saja. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai hak-hak anak masih sangat rendah dikalangan warga sekolah, baik guru sebagai tenaga pendidik, kepala sekolah dan perangkat sekolah lainnya, guru dsb.

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia no 137 tahun 2014 tentang standar Nasional PAUD pada bab VII pasal 28 menyatakan bahwa pendidik TK merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan, sedangkan untuk pengertian Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD. Pada tugas pokok kedua elemen penting TK ini terdapat tugas pengasuhan dan perlindungan untuk pendidik atau guru, sedangkan untuk tenaga kependidikannya memiliki tugas pokok sebagai pengawas dan pelayanan untuk menunjang proses pendidikan.

Rudiyanto (2017) menjelaskan peran Pendidik Tenaga kependidikan serta warga sekolah dalam mewujudkan 5 prinsip SRA di TK. Yaitu sebagai berikut.

1. Warga Sekolah / Guru tidak akan membeda-bedakan dan menjamin setiap anak usia dini untuk menikmati hak yang sama. (Nondiskriminasi atas; disabilitas, gender, Sara, status sosek, termasuk keunikan lainnya).
2. Warga Sekolah / Guru akan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, terutama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil lembaga/satuan.
3. Warga Sekolah / Guru menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik integrative.

4. Warga Sekolah / Guru menghormati pandangan anak, mencakup penghormatan atas hak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal.
5. Warga Sekolah / Guru mewujudkan pengelolaan lembaga/TK yang transparan, akuntabel, partisipatif, menciptakan keterbukaan informasi, dan menjunjung supremasi hukum.

Pada kenyataannya dilapangan, sangat sedikit pendidik dan perangkat sekolah lainnya yang mengetahui serta memiliki pemahaman mengenai hak-hak anak. hal ini menjadi gambaran bahwa bagaimana pendidik dan perangkat sekolah dapat melaksanakan peran untuk memenuhi hak-hak anak, disaat pengetahuan mengenai hak-hak anak tersebut masih minim dan kurang. Maka dari hasil wawancara dengan pak Fahmi sebagai fasilitator SRA mengatakan karena pengetahuan dan pemahaman warga sekolah dan lembaga sekolah di Kota Bandung masih sangat minim, dikarenakan program sekolah ramah ini merupakan program baru yang baru berjalan sekitar 2 tahun BP3AKB bidang perlindungan anak tahun ini sedang menggencarkan sosialisasi mengenai hak-hak anak dan SRA kepada lembaga lembaga sekolah di Kota Bandung.

Hasil penelitian Hanum (UNY, 2006:56) mengenai "Fenomena Tindak Kekerasan yang dialami Anak di Rumah dan di Sekolah" menunjukkan bahwa anak-anak pada umur di bawah 12 tahun sangat rawan akan tindak kekerasan dari orang tua maupun gurunya. Banyak orang tua yang belum menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan tersebut, sebenarnya merupakan kekerasan terhadap anak. Umumnya, anak-anak yang menjadi korban kekerasan memiliki harapan pada orang tua mereka agar mau menyayangi dan memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan kelembutan. Sedangkan kekerasan yang dilakukan guru di sekolah berdampak pada hilangnya motivasi belajar dan kesulitan dalam memahami pelajaran, sehingga umumnya prestasi belajar mereka juga rendah. Kekerasan guru terhadap siswa juga menyebabkan siswa benci dan takut pada guru.

Jadi pemahaman perangkat sekolah dan orang tua mengenai hak-hak anak sangatlah penting, untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan dan perilaku perilaku yang menyimpang. Pun dalam pelaksanaannya PAUD ramah anak adalah

implementasi sekolah yang menerapkan hak-hak anak setiap harinya. Akan menjadi sebuah hambatan jika perangkat sekolah dan orang tuanya saja tidak memahami dan mengetahui tentang hak-hak anak, yang menjadi pondasi utama didalam keberlangsungan PAUD ramah ank.

4. Kesiapan PAUD di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menuju PAUD ramah anak dilihat dari aspek Sarana dan Prasarana.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan sebelumnya, bahwa kesiapan TK di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menuju PAUD ramah anak mencapai 62,40%% dilihat dari aspek sarana dan prasarana sekolah , dan sebesar 37,60% nya belum siap. Persentase tersebut berada pada kategori Siap, artinya TK sudah memenuhi kriteria menjadi SRA dalam aspek sarana prasarana sekolah. Adapun item item pernyataan yang menjadi indikator kesiapan TK menjadi PAUD ramah anak dalam penelitian ini sebanyak 42 item pernyataan, aspek ini menjadi aspek yang memiliki item pernyataan yang paling banyak pada indikator SRA.

Permendikbud no 137 tahun 2014 mengatakan bahwa Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Prinsip pengadaan sarana prasarana meliputi aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah, sesuai dengan tingkat perkembangan anak, memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada di lingkungan, sekitar, dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak.

Dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana TK sudah dijelaskan dalam permendikbud no 137 tahun 2014 bab VIII bahwa terdapat standar standar minimum pelayanan sarana prasarana TK dilihat dari jalur formal non formal. Adapun item item pernyataan indikator sekolah ramah adalah pengadaptasian permendikbud tersebut disesuaikan dengan prinsip-prinsip pemenuhan dan perlindungan hak anak, untuk TK jalur formal standar sarana dan prasarana sudah dipaparkan dalam pasal 32 bab VIII.

Menurut direktorat pembinaan pendidikan anak usia dini direktorat jenderal pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia (2014, hlm.8) Pertumbuhan dan perkembangan

anak usia dini yang optimal dapat dicapai bila prasarana dirancang dengan memperhatikan kebutuhan anak :

1. Keleluasaan anak dalam melakukan aktifitas. Anak usia dini sangat aktif, sehingga diperlukan lingkungan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk bergerak dengan leluasa. Oleh karena itu, sangat penting bagi pendidik untuk menyediakan dan menata prasarana yang memberikan stimulasi atau rangsangan motorik pada anak.
2. Kenyamanan anak dalam menggunakan prasarana. Anak akan merasa leluasa bereksplorasi dalam lingkungan jika anak merasa nyaman. Oleh karena itu, pendidik perlu merencanakan penataan prasarana yang menumbuhkan minat anak dalam belajar.
3. Tingkat kemampuan anak dalam menggunakan prasarana. Setiap anak adalah unik dan memiliki tahapan perkembangan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidik perlu memahami dan memperhatikan tingkat kesulitan anak dalam memanfaatkan prasarana agar anak menggunakan prasarana secara mandiri.
4. Tingkat kepekaan anak dalam menggunakan prasarana. Anak usia dini perlu dilatih kepekaan dirinya dengan lingkungan. Oleh karena itu, pendidik perlu memberikan berbagai pengalaman yang meningkatkan kepekaan diri terhadap reaksi tubuh saat menggunakan prasarana, misalnya ketika anak berjalan di atas lantai yang agak licin dan kehilangan keseimbangan sehingga perlu berpegangan pada dinding untuk mengembalikan keseimbangan tubuhnya.

Temuan dilapangan, ada 12 item pernyataan yang keadaannya belum sesuai kriteria yang layak untuk SRA. yaitu.

1. Bangunan sekolah memiliki sistem proteksi kebakaran yang berfungsi dengan baik.
2. Memiliki sistem evakuasi bencana yang memadai.
3. Memiliki titik kumpul pada saat bencana.
4. Bangunan sekolah memiliki jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadam kebakaran.
5. Tersedia toilet dengan jumlah unit menyesuaikan jumlah murid yang terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan.

6. *Pemisahan jarak akses pintu masuk antara toilet bagi murid laki-laki dan perempuan.*
7. Perabot toilet menggunakan ukuran yang sesuai dengan anak.
8. sekolah memiliki ruangan UKS dengan peralatan sebagai berikut : tempat tidur, alat ukur tinggi badan dan berat badan, alat ukur ketajaman mata dan telinga, perlengkapan P3K.
9. Sekolah memiliki ruang perpustakaan atau sumber belajar.
10. Ratio toilet perempuan dan laki-laki, fungsi dan kebersihan, ada pengawasan.
11. *Memiliki area/ruangan bermain (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas.*
12. Sekolah memiliki ruang kreativitas (pojok gembira, tempat peserta didik mengekspresikan diri)

Dilihat dari item pernyataan diatas, TK di Kecamatan Sukasari masih kurang kesiapannya pada kesiapan pencegahan dan penanganan bencana, pencegahan dan penanganan kesehatan dan kebersihan, fasilitas sekolah seperti perpustakaan, dan tempat bermain, serta fasilitas untuk menyalurkan kreativias anak.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebanyakan TK belum memiliki kesadaran akan pentingnya pencegahan dan penanganan pada bencana, kesehatan dan kebersihan. Ditunjukkan dengan hasil wawancara dengan guru di TK di kecamatan Sukasari hampir 70% mengatakan bahwa mereka tidak memiliki fasilitas penanganan bencana karena diTK tersebut belum pernah terjadi bencana alam seperti kebakaran, gempa, dsb. Tentu ini sangat tidak baik dalam penyediaan sarana Prasarana, hambatan dilapangan menunjukkan bahwa anggaran memang menjadi faktor utama serta kesadaran perangkat sekolah akan fungsi dari setiap sarana dan prasarana yang masih kurang.

5. Kesiapan PAUD di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menuju PAUD ramah anak dilihat dari aspek Peran anak dan orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan sebelumnya, bahwa kesiapan TK di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menuju PAUD ramah anak mencapai 78,20% dilihat dari aspek peran anak dan orang tua, Persentase tersebut berada pada kategori Sangat siap, artinya TK sudah memenuhi kriteria menjadi SRA

dalam aspek sarana prasarana sekolah. Adapun item item pernyataan yang menjadi indikator kesiapan TK menjadi PAUD ramah anak dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Peserta didik dapat memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat
2. Orang tua/wali menyekolahkan anak dekat dengan orang tua (rumah/kantor).
3. Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah.
4. Komunikasi intens antara orang tua dan guru (ket.Misalnya lewat media social whatsapp).
5. Mempunyai working group (mulai membentuk working group) contoh grup whatsapp.
6. Orang tua Menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak
7. Orang tua Memberikan persetujuan setiap kegiatan peserta didik disatuan pendidikan
8. Orang tua Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak.
9. Pendidik dan anak memiliki working group
10. Peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan

Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa peran anak dan peran orang tua sudah cukup baik. Berkomunikasi dengan orangtua merupakan salah satu tanggungjawab pendidik. Demikian juga dengan orang tua, mereka perlu menjalin komunikasi dengan pendidik. Komunikasi timbal balik ini akan sangat efektif untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada anak usia dini. Orang tua dan pendidik saling berbagi informasi mengenai program sekolah maupun tentang individual anak. Orang tua dapat mengetahui program-program yang akan dan sedang dilaksanakan oleh sekolah. Disamping itu juga dapat memberi sarana serta kritikan tentang pelaksanaan program-program sekolah, dan saling bekerjasama demi kemajuan anak dan sekolah.

Pendidik dan sekolah dapat meninformasikan dan berdiskusi tentang perkembangan anak selama mengikuti kegiatan disekolah dan juga menggali informasi dari orang tua tentang berbagai hal mengenai anak tersebut.

Kegiatan berkomunikasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Baik secara formal maupun informal, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi bukan hal yang mudah bagi pendidik maupun orang tua untuk menjalin komunikasi dua arah secara efektif. Kegiatan berkomunikasi tersebut memiliki manfaat bagi orang tua antara lain .

- a. Peran orang tua meningkatkan interaksi dan diskusi dengan anak-anak mereka dan para orang tua menjadi lebih responsive dan sensitive terhadap perkembangan anak.
- b. Orang tua memperoleh wawasan tentang perkembangan anak-anak lebih berguna dan menjadi dorongan positif sehingga mengurangi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.
- c. Orang tua memiliki pemahaman yang lebih tentang tugas pendidik dan kurikulum sekolah.
- d. Orang tua menjadi lebih paham apa yang dipelajari anak-anak, sehingga sekolah dan orang tua dapat bersinergis untuk optimalisasi pembelajaran.
- e. Memperkuat ikatan orang tua dengan sekolah.
- f. Para orang tua akan lebih sadar dan menjadi lebih peduli terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan yang diambil oleh sekolah, lebih bagus lagi jika orang tua dapat dilibatkan sebagai tim pengambil keputusan.

Hal-hal tersebut di atas sudah dimiliki oleh TK di Kecamatan Sukasari karena TK memiliki kesadaran bahwa orang tua memiliki peran penting dalam kesuksesan pendidikan anak. Keadaan di lapangan belum menunjukkan hambatan yang berarti, hanya saja untuk beberapa TK memang orang tua dan anak belum begitu dilibatkan dalam proses penyelenggaraan sekolah, karena memang *mindset* yang masih belum memahami bahwa seluruh elemen baik orang tua dan sekolah harus bekerjasama untuk kesuksesan pendidikan anak belum tertanam.

6. Kesiapan PAUD di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menuju PAUD ramah anak dilihat dari aspek peran Masyarakat dan pemangku kebijakan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan sebelumnya, bahwa kesiapan TK di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menuju PAUD ramah anak mencapai 100% dilihat dari aspek Masyarakat dan pemangku kebijakan lainnya, Persentase tersebut berada pada kategori Sangat siap, artinya TK sudah memenuhi kriteria menjadi SRA dalam aspek tersebut. pada aspek ini hanya ada satu item pernyataan. Keadaan dilapangan belum menunjukkan hambatan yang berarti, karena komunikasi dan peran masyarakat sudah cukup baik.

Peran serta masyarakat seperti yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 8 menyatakan: “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”, dan Pasal 9 menyatakan: “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Peningkatan efektivitas peran serta masyarakat terutama dunia usaha seyogyanya diatur oleh pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota guna mendukung penerapan SRA. Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pelaksanaan SRA antara lain dapat diwujudkan melalui Komite sekolah sebagai lembaga pertimbangan dalam menentukan kebijakan pendidikan mulai pembuatan peraturan hingga pengadaan sarana.